

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG

*Untuk Periode yang
Berakhir 30 Setember
Tahun 2024*

*Bagian Anggaran
005.04.652081 (Badan
Peradilan Agama MA-RI)*

**Jl. Awang Long No 69
Bontang
Kota Bontang - Kalimantan Timur
75311**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bontang, 18 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP 198501172006041001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI. Lampiran dan Daftar	43

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Jalan Awang Long No 69 Bontang Telp. (0548) 23001

Email : kantor.pabontang@gmail.com

BONTANG - 75311

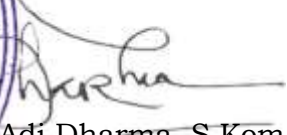
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bontang, 18 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP. 19850117200604 2002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.39,976,500. atau mencapai 61 persen dari estimasi Pendapatan- LRA sebesar Rp 65,530,000. Sehingga Realisasi di atas (bawah) Anggaran Rp. (25.553,500)

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 60,471.000. atau mencapai 82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.73.482.000. Sehingga Realisasi di atas (bawah) Anggaran Rp. (13.065,000.)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024.

Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.24.826.300 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.24.826.300 Aset Tetap (neto) sebesar Rp Rp24.826.300

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.24.826.300 dan Rp.24.826.300

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp 39,976,500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 62.497.910 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (22.520.500) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit adalah Rp 0 dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp (22.520.500) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (22.520.500).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Surplus/Defisit- LO sebesar Rp.(22.520.500) kemudian Kenaikan/penurunan Ekuitas senilai Rp0 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp.0).

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2024		% thd Angg	30 SEPTEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	65,530,000-	39,976,500-	61.00	45,187,500
JUMLAH PENDAPATAN		65,530,000-	39,976,500-	61.00	45,187,500
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	73,482,000	60,417,000	8200	47,000,000
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
	B.6				
JUMLAH BELANJA		73,482,000	60,417,000	8200	47,000,000

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA BONTANG NERACA PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(DalamRupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2024	30 SEPTEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas lainnya dan setara KAs	C.1	24.826.300	-
Persediaan	C.10	0	0
Jumlah Aset Lancar		24.826.300	0
JUMLAH ASET		24,826,300	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Pihak Ketiga	C.25	24.826.300-	0
JUMLAH KEWAJIBAN		24,826,300	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	24,826,300	0
JUMLAH EKUITAS		24,826,300	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24,826,300	0

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2024	30 SEPTEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	39.976.500	45.187.500
JUMLAH PENDAPATAN		39.976.500	45.187.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	4,000,000	3.267.910
Beban Barang dan Jasa	D.4	37,185,000	40.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21,312,000	10.200.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		62,497,000	53.467.910
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(22,520,500)	(8.280.410)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22,520,500)	(8.280.410)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(22,520,500)	(8.280.410)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA BONTANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30
SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIA N	CATAT AN	30 September 2024	30 SEPTEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22,520,500)	(8,280,410)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		22,520,500	3,280,410
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		0	(5.000.000)
EKUITAS AKHIR	E.8	0	(5.000.000)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bontang

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Kantor Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No. 69 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang Kantor Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung"
--	--

Misi adalah Misi Pengadilan Agama Bontang adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang.
4. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan Kredibilitas, dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang

1. Bidang Kepaniteraan :

- ☐ Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- ☐ Meningkatkan administrasi perkara secara profesional, efisien dan efektif.
- ☐ Menertibkan administrasi perkara dengan pola bindalmin.
- ☐ Menertibkan administrasi keuangan perkara.
- ☐ Meningkatkan pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang harmonis.
- ☐ Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama

2. Bidang Kesekretariatan :

- ☐ Meningkatkan disiplin pegawai dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (hari) kerja sesuai dengan kinerja aparat peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.
- ☐ Menertibkan administrasi data kepegawaian dengan mengaplikasikan Sistem Informasi kepegawaian (SIMKEP)
- ☐ Menertibkan prosedur usul kenaikan pangkat tepat waktu.
- ☐ Meningkatkan SDM pegawai.
- ☐ Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ☐ Meningkatkan penyusunan anggaran tahun yang akan datang.
- ☐ Melaksanakan persuratan dan perlengkapan kantor.
- ☐ Melaksanakan administrasi perpustakaan secara tertib.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.1. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1)Pendapatan- LRA

☐Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

☐Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

☐Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

☐Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

☐ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

☐ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

☐ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

☐ **(3) Belanja**

Belanja

☐ ☐ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

☐ ☐ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- ☐ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat bertanggungjawab atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ☐ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- ☐ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ☐ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- ☐ ☐ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ☐ Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

☐ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

☐ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung	50%

	sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- ☐ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ☐ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lain nya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- ☐ Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ☐ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ☐ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam. Pengeluaran nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barangbercorak kesenian.
- ☐ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- ☐ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- ☐ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ☐ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- ☐ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- ☐ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ☐ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ☐ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- ☐ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ☐ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

(7) Ekuitas

Ekuitas

- (8) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan
Akuntansi
Pertama Kali*

(9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai Tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 SEPTEMBER 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua,

keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2023 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Bontang* tidak ada mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp.39,976,500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp39,976,500. atau mencapai 61 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp65,530,000. Pendapatan Pengadilan Agama Bontang terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan negara bukan pajak	65,530,000-	39,976,500-	61-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 September 2024 dan 30 SEPTEMBER 2023

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 tidak mengalami penurunan/kenaikan 61 persen dibandingkan TA 2023. pada Kantor Pengadilan Agama Bontang

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan negara bukan pajak	39,976,500	45,187,500	(56.00)
Jumlah	39,976,500	45,187,500	(56.00)

Realisasi
Belanja Negara
Rp.60,417,000

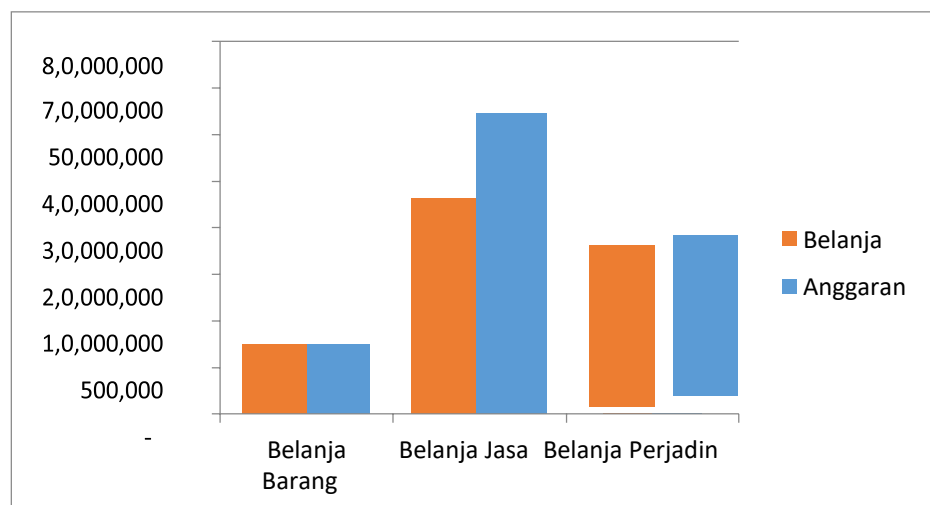
B2. Belanja Negara

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 60,417,000 atau 82.22% dari anggaran belanja sebesar Rp.73,482,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi /Anggaran
Belanja Barang	1,920,000	1,920,000	100
Belanja Jasa	50,250,000	37,185,000	74
Belanja Perjalanan Dinas	21,312,000	21,312,000	100.00
Total Belanja Kotor	73,482,000	60,417,000	82.22
Pengembalian	-	-	
Jumlah	73,482,000	60,417,000	82.22

Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024



Realisasi Belanja TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 22% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena DIPA anggaran Tahun 2024 terdapat kenaikan Pagu anggaran dari pagu tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	1,920,000	1,800,000	6,25
Belanja Jasa	37,185,000	35,000,000	5,88
Belanja Perjalanan Dinas	21,312,000	10,200,000	52,13
Jumlah	60,417,000	47,000,000	22.00

a. Belanja Barang Persediaan

**Belanja
Barang
Persediaan
Rp. 1,920,000**

Realisasi Belanja Barang Perasediaan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masingsebesar Rp.1,920,000 dan Rp. 1,800,000 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 6.25% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

b Belanja Jasa

**Belanja Jasa
Rp. 37,185,000**

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp, 37,185,000 dan Rp.35,000,000. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 5.88% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023 Hal ini antara lain disebabkan oleh

kenaikan anggaran Dipa belanja Barang Jasa yang diperoleh Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 dan masih tersisa 3 (tiga) bulan

c .Belanja Perjalanan Dinas

*Belanja
Perjalanan
Dinas*

Rp.21.312.000

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp.21.312.000 dan Rp.10.200.000 Realisasi Modal TA 2024 tidak mengalami.

penurunan/kenaikan 52.13% dari Realisasi Belanja Modal Barang TA 2023.

Hal ini hanya terdapat penurunan pagu belanja barang atau menurunnya anggaran DIPA Belanja Modal yang diperoleh Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 sebesar Rp0.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara penerima per 30 September 2024.

*Kas
Lainnya
dan Setara
Kas
Rp.24,826,300*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas lainnya dan setara kas per 30 September 2024 sebesar Rp. 24,826,300

*Piutang
PNBP Rp0*

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat Saldo piutang PNBP per 30 September 2024

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 September 2024

*Bagian
Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2024

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar per 30 September 2024.

*Belanja Dibayar
diMuka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2024.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 September 2024.

*Persediaan
Rp.0.*

C.10 Persediaan

Terdapat Nilai Persediaan per 30 September 2024 sebesar Rp 0.

*Tagihan
TP/TGR Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2024.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak Terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2024.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang

Jangka

Panjang Rp0

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2024

Tanah

Rp.0

C.14 Tanah

Terdapat Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bontang per 30 September 2024 sebesar Rp0.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp.0

C.15 Peralatan dan Mesin

Terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 sebesar Rp.0

*Gedung dan
Bangunan Rp.0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 sebesar Rp.0.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2024.

*Aset Tetap Lainnya
Rp.0*

C.18 Aset Tetap Lainnya.

Terdapat Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 sebesar Rp.0

Konstruksi

C19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Dalam Pengerjaan
Rp0*

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2024

Akumulasi

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap Rp.0. Tak*

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 sebesar Rp.0.

*Aset Berwujud
Rp.0.*

C.21 Aset Tak Berwujud

Terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 sebesar Rp.0.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2024.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.0.*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2024 sebesar Rp.0

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 sebesar Rp.0

*Utang kepada
Pihak Ketiga*

Rp. 24,826,300

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp24,826,300*

*Kewajiban
Rp 24,826,300*

*Ekuitas Rp
24,826,300*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Tidak terdapat Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 sebesar Rp. 24,826,300

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Nilai Pendapatan
Ditangguhkan per 30 September 2024.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2024.

C. 28 Beban Kewajiban Jangka Pendek

Terdapat Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 sebesar Rp 24,826,300

C.29 Kewajiban

Terdapat Kewajiban per 30 September 2024 sebesar Rp 24,826,300.

C.30 Ekuitas

Terdapat Ekuitas per 30 September 2024 sebesar Rp 24,826,300.

.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp.39,976,500

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024. dan 2023 adalah sebesar Rp. 39,976,500 dan Rp. 45,187,500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,976,500	45,187,500	(11.532)

Beban Pegawai
Rp.0

D.2 Beban Pegawai

Terdapat Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 sebesar Rp.0

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pegawai	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Persediaan
Rp 4.000,000

D.3 Beban Persediaan

Terdapat Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4,000,000 dan 3,267,910

..

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Persediaan	4,000,000	3,267,910	22.402

**Beban
Barang dan
Jasa Rp
37,185,000**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 37,185,000 dan Rp 40,000,000 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
(7.037)barang dan Jasa	37,185,000	40,000,000	(7.037)

**Beban
Pemeliharaan
Rp.0**

D.5 Beban Pemeliharaan

Terdapat Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp.0 Tidak Terdapat Beban Pemeliharaan di Tahun 2024

D.6 Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.21,312,000**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 21,702,393 dan Rp. 10,200,000 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	21,702,393	10,200,000	108.941

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak Terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2024

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.*

Terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 sebesar Rp.0

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Terdapat Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp.0.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.0*

Terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp.0

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp.(22,520,500)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(22,520,500) dan Rp (3,280,410), Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2024

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Rp0*

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Tidak terdapat Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap untuk Tahun 2024.

*Koreksi Atas Beban
Rp0*

E.5 Koreksi Atas Beban

Tidak terdapat Koreksi Atas Beban untuk Tahun 2024

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp0*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Tidak terdapat Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2024

*Koreksi Hibah
Masuk/ Keluar
Rp0*

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Tidak terdapat Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar untuk Tahun 2024.

*Ekuitas Akhir
Rp0*

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp (5,000,000).

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Tahun 2023.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 653246520801000 Nama Rekening BPG 046 PENGADILAN AGAMA BONTANG dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-1654/WPB,12/KP0.06/2020 tanggal 23 Juni 2020

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

BANK BRI Kantor Cabang Bontang Nomor 000018 a.n. RPL 046 PA Kelas II Bontang PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per 30 September 2024 sebesar Rp.24.846.300. Untuk perizinan rekening ini telah mendapat ijin Mahkamah Agung Republik Indonesia. Daftar Penutupan Rekening dan Daftar rekening pemerintah serta fotocopy rekening koran disajikan sebagaimana dalam lampiran. Selain penerimaan perkara, Pengadilan Agama Bontang juga mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan Agama Bontang memungut kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp. 50.000.00. per perkara. Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap bulan.

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Terdapat Revisi DIPA per 30 September 2024. yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

Revisi 1 DIPA tanggal 13 Februari 2024 dalam rangka Revisi Adminitrasi dengan cara Ralat rencana Penarikan dan Halaman III Dipa dengan Pertimbangan Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA

Revisi 2 DIPA tanggal 18 April dalam rangka Revisi Adminitrasi dengan cara Ralat rencana Penarikan dan Halaman III Dipa dengan Pertimbangan Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM pada periode pada tanggal 30 September 2024.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Selama Tahun 2024 per 30 September 2024 tidak terjadi perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Bontang

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 11:00 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,976,500	45,187,500	(5,211,000)	(11.532)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,976,500	45,187,500	(5,211,000)	(11.532)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	39,976,500	45,187,500	(5,211,000)	(11.532)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	4,000,000	3,267,910	732,090	22.402
Beban Barang dan Jasa	37,185,000	40,000,000	(2,815,000)	(7.037)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	21,312,000	10,200,000	11,112,000	108.941
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 11:00 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	62,497,000	53,467,910	9,029,090	16.887
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22,520,500)	(8,280,410)	(14,240,090)	171.973
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22,520,500)	(8,280,410)	(14,240,090)	171.973
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22,520,500)	(8,280,410)	(14,240,090)	171.973

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652081

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 12:33 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	65,530,000	39,976,500	(25,553,500)	61	53,448,000	45,187,500	8,260,500	85
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	65,530,000	39,976,500	(25,553,500)	61	53,448,000	45,187,500	8,260,500	85
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	65,530,000	39,976,500	(25,553,500)	61	53,448,000	45,187,500	8,260,500	85
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	73,482,000	60,417,000	(13,065,000)	82	62,000,000	47,000,000	15,000,000	76
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	73,482,000	60,417,000	(13,065,000)	82	62,000,000	47,000,000	15,000,000	76
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652081

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 12:33 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	73,482,000	60,417,000	(13,065,000)	82	62,000,000	47,000,000	15,000,000	76
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 11:06 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22,520,500)	(8,280,410)	(14,240,090)	171.97
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	22,520,500	3,280,410	19,240,090	586.51
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(5,000,000)	5,000,000	(100)
EKUITAS AKHIR	0	(5,000,000)	5,000,000	(100)

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 12:35 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	24,826,300	0	24,826,300	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	24,826,300	0	24,826,300	
JUMLAH ASET	24,826,300	0	24,826,300	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	24,826,300	0	24,826,300	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24,826,300	0	24,826,300	
JUMLAH KEWAJIBAN	24,826,300	0	24,826,300	

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,826,300	0	24,826,300	
------------------------------	------------	---	------------	--

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 12:48 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	24,826,300	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	24,826,300
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	60,417,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	39,976,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,080,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	5,690,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	10,770,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	23,516,500
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	37,185,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,312,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,000,000	0
JUMLAH			127,299,800	127,299,800

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 1:04 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	60,417,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	39,976,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	5,690,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	10,770,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	0	23,516,500
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,920,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	37,185,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,312,000	0
JUMLAH			100,393,500	100,393,500

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
198501172006041001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 652081 **PENGADILAN AGAMA BONTANG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/12/24 9:01 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 13/12/24 8:26 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,920,000	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,920,000	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,250,000	50,250,000	37,185,000	0	37,185,000	74	13,065,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	50,250,000	50,250,000	37,185,000	0	37,185,000	74	13,065,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,312,000	21,312,000	21,312,000	0	21,312,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,312,000	21,312,000	21,312,000	0	21,312,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	73,482,000	73,482,000	60,417,000	0	60,417,000	82.22	13,065,000
	JUMLAH BELANJA	73,482,000	73,482,000	60,417,000	0	60,417,000	82.22	13,065,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 652081 **PENGADILAN AGAMA BONTANG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/12/24 9:04 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	50,000,000	35,000,000	0	35,000,000	70	15,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	50,000,000	50,000,000	35,000,000	0	35,000,000	70	15,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	62,000,000	62,000,000	47,000,000	0	47,000,000	75.81	15,000,000
	JUMLAH BELANJA	62,000,000	62,000,000	47,000,000	0	47,000,000	75.81	15,000,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 652081 PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 30/10/24 1:15 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bontang, 30 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Yuri Adi Dharma, S.Kom.
198501172006041001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 652081
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-09**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	73482000	73482000	0
2	Belanja	60417000	60417000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	65530000	65530000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	39976500	39976500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-OCT-24





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311

Telp. (0548) 23001 WhatsApp: +62 813-5125-6098 Email kantor.pabontang@gmail.com

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 318/SEK.PA.W17-A6/KU1.0.1/X/2024

Kepada

Yth: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Samarinda

Di -

Samarinda

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Pengiriman: LK satker 652081 Triwulan 3 tahun 2024	1 (satu) Bundel	Disampaikan dengan hormat guna dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Bontang, 29 Oktober 2024

Sekretaris,



**Yuri Adi Dharma.S.Kom NIP.
19850117200604 1 001**